

## ANALISIS PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BELANJA MODAL DPU KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

\*Muji Bagus Prastyo<sup>1</sup>, Antonius<sup>2</sup>, Abdul Rochim<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang

<sup>\*)</sup> muji\_prastyo@yahoo.co.id<sup>1</sup>, Antonius@unissula.ac.id<sup>2</sup>, abdulrochim@unissula.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services which is relatively more comprehensive is expected to be able to regulate order in the implementation of government procurement of goods and services. The government provides the widest opportunity for small businesses, micro-enterprises and cooperatives to take part in tenders for goods/services procurement work packages. The purpose of this study is divided into 2 (two) which are research stages, namely analyzing the effectiveness of the regional financial performance of the Semarang City Government, analyzing the efficiency of the regional financial performance of the Semarang City Government with variables. The type of research used in this research is research using quantitative methods with SWOT analysis and questionnaire methods, qualitative descriptive analysis by measuring the financial performance of the DPU Semarang City Government through the concepts of effectiveness and efficiency. Measurement is measured through a comparison of actual revenue with revenue budget. Based on the results of the analysis using SWOT analysis with IFAS and EFAS scores, it can be seen that the Planning and Budgeting of Capital Expenditures for the DPU for the City of Semarang for the 2019 Fiscal Year is located in Quadrant I. From the calculation of the effectiveness and efficiency of the DPU for the City of Semarang in 2019 it looks effective but not efficient, because it obtained the effectiveness value is 105.53% where the value indicates it is effective, and the efficiency value is 106.7% where the value indicates it is not efficient.*

**Keywords:** Presidential Regulation No.54 of 2010, SWOT Method, IFAS, EFAS

### ABSTRAK

Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang relatif lebih komprehensif diharapkan mampu untuk mengatur tertib dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pemerintah memberi peluang seluas-luasnya kepada usaha kecil, usaha mikro dan koperasi untuk mengikuti tender paket pekerjaan pengadaan barang/jasa. Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yang merupakan tahap penelitian, yaitu menganalisis efektivitas kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Semarang, menganalisis efisiensi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Semarang dengan variabel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis SWOT dan metode kuisioner, analisis deskriptif kualitatif dengan mengukur kinerja keuangan DPU Pemerintah Kota Semarang lewat konsep efektivitas dan efisiensi. Pengukuran diukur melalui perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Berdasarkan hasil analisa yang menggunakan analisa SWOT dengan skor IFAS dan EFAS dapat diketahui Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal DPU Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 terletak pada Kuadran I. Dari perhitungan efektifitas dan efisiensi anggaran DPU Kota Semarang pada Tahun 2019 terlihat efektif tapi tidak efisien, karena didapatkan nilai efektifitas 105,53% dimana nilai tersebut menunjukkan sudah efektif, dan nilai efisiensi sebesar 106,7% dimana nilai tersebut menunjukkan tidak efisien.

**Kata Kunci:** Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, Metode SWOT, IFAS, EFAS

## 1. PENDAHULUAN

Latar belakang dikeluarkannya perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

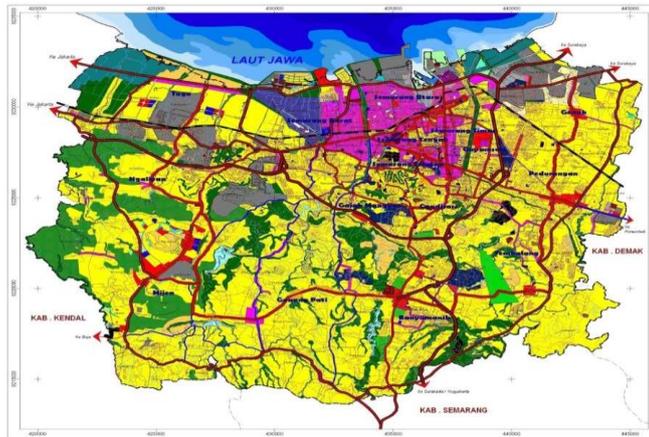
Strategi pemenang yang rumit ini umumnya dilacak dalam perolehan barang dan juga keuntungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau negara bagian provinsi (akuisisi pemerintah), BUMN, dan bisnis milik swasta. Oleh karena itu, Pasal 22 PP No. 5 Tahun 1999 tidak hanya mencakup pelaksanaan akuisisi yang dilakukan oleh Badan Umum, tetapi juga pelaksanaan akuisisi yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN/BUMD) dan badan usaha milik swasta. Berdasarkan Klarifikasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang halus adalah usulan untuk mengajukan biaya untuk membeli suatu tugas, untuk memperoleh produk atau untuk menawarkan jenis bantuan. Dalam hal ini tidak disebutkan jumlah penawar (oleh beberapa atau oleh satu pelaku bisnis karena pengaturan langsung / keputusan politik).

Pedoman mengenai metodologi Perolehan Produk/Administrasi Pemerintah dalam Pedoman Dinas ini diyakini dapat lebih mengembangkan iklim usaha yang kondusif, kemampuan belanja negara, dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD. Demikian pula dengan Perolehan Barang Dagangan/Administrasi Pemerintah yang diarahkan oleh Pedoman Dinas ini diarahkan untuk memperluas pengaturan dengan usaha industri publik dan swasta, serta mendorong usaha negara yang imajinatif, kreatif, dan mandiri dengan menitikberatkan pada pemanfaatan usaha-usaha vital dalam negeri. Selain itu, pengaturan Produk/Administrasi Perolehan Pemerintah dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2010 dimaksudkan untuk memperluas tanggung jawab Pemerintah Daerah atas/pelakuan yang pelaksanaannya dilaksanakan melalui rencana pendampingan antara Pemerintah Pusat dan Negara Bagian Provinsi.

## 2. METODE PENELITIAN

### Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian yaitu di Kota Semarang, Adapun peta lokasi terdapat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Lokasi Penelitian

### Sumber data

Dalam penelitian yang dipimpin oleh analis memanfaatkan informasi penting. Informasi esensial itu sendiri adalah semakin lugasnya obyek pemeriksaan melalui catatan, keterangan tambahan dan penyidikan yang berhubungan dengan kelangsungan dan efektifitas penyajian Pemerintah Daerah Semarang. Sedangkan responden yang berasal dari populasi besar pegawai DPU di kota Semarang yang nantinya akan dirinci menggunakan pemeriksaan SWOT dengan teknik survey.

### Metode analisis data

Strategi eksplorasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan subyektif yang merencanakan untuk mengkuantifikasi penyajian keuangan DPU Pemda Semarang menurut sudut pandang kelayakan dan kemampuan.

#### 1. Renungan eksekusi

Presentasi ujian ini digunakan untuk mengukur kinerja administrasi keuangan provinsi, dalam hal ini Pemda Semarang. Proporsi ditentukan dengan membandingkan pengeluaran asli dan pembayaran yang direncanakan. Sebagaimana tercatat di bawah ini (Mahmudi, 2013: 86):

$$Efektifitas = \frac{Outcome (Realisasi Pendapatan)}{Output (Anggaran Pendapatan)} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome = Realisasi Pendapatan

Output = Anggaran Pendapatan

Untuk mengukur kelayakan penilaian yang sebenarnya, standar harus ditata sebagai patokan atau pola untuk memutuskan apakah penilaian dapat diatur dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi (2013: 111) pada Tabel 1.

Tabel 1. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas (%)	Kriteria
≥	Efektif
85-99	Cukup Efektif
65-84	Kurang Efektif
≤65	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2013

Pada tabel 1 di atas dijelaskan klasifikasi rasio efektifitas dari yang efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif.

## 2. Konsep Efisiensi

Analisis kinerja digunakan untuk mengetahui apakah suatu produk dikatakan efisien dengan mencapai output yang tinggi dengan input yang rendah. Dilihat dengan membandingkan pelaksanaan pengeluaran dan pelaksanaan pendapatan dalam kerangka Mahmudi (2013:85) yaitu:

$$Efisiensi = \frac{Output (Realisasi Belanja)}{Input (Realisasi Pendapatan)} \times 100\%$$

Keterangan:

*Output* = Realisasi Belanja

*Input* = Realisasi Pendapatan

Untuk menentukan derajat ketelitian pemeriksaan diharapkan dapat diterapkan norma-norma sebagai standar mutu. Dikatakan menarik jika memenuhi standar yang ditetapkan oleh Mahmudi (2013: 111) pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Rasio Efisiensi

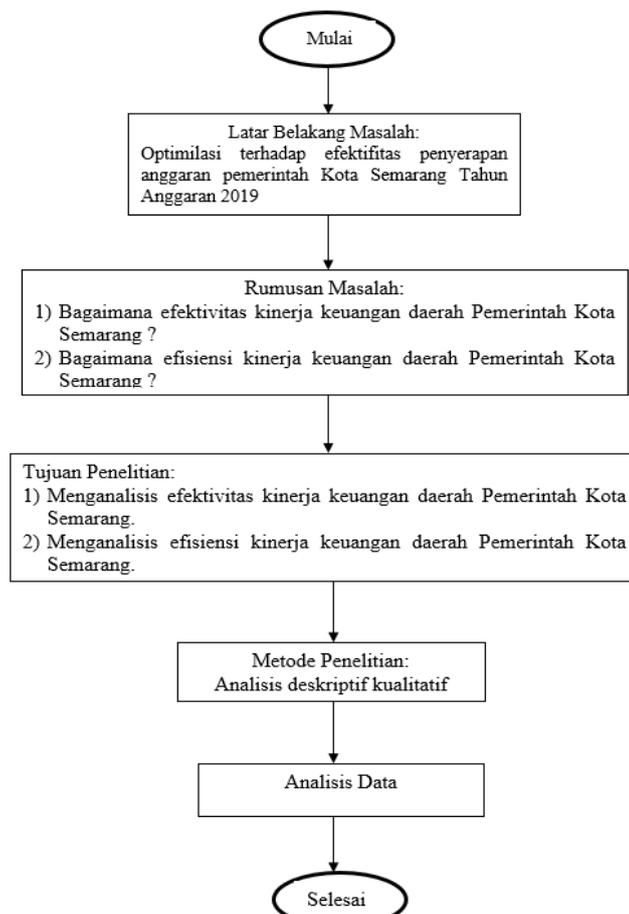
Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
<90	Sangat Efisien
90-90	Efisien
100	Cukup Efisien
>100	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi, 2013

Pada tabel 2 di atas dijelaskan klasifikasi rasio efisiensi dari yang sangat efisien, efisien, cukup efisien, dan tidak efisien.

## Diagram Alur Penelitian

Tahapan peninjauan efektivitas penyusunan RKAP Rangka Perolehan Tugas 2019/2020 dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini:



**Gambar 2.** Rancangan Penelitian

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Wilayah adminintrasi

Wilayah dan luas Kota Semarang memiliki luas 373,70 km<sup>2</sup>. Secara otoritatif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 daerah dan 177 daerah. Diantara 16 kecamatan yang ada, terdapat 2 lokal dengan wilayah terbesar yaitu wilayah Mijen dengan luas 57,55 km<sup>2</sup> dan wilayah Gunungpati dengan luas 54,11 km<sup>2</sup>. Kedua kawasan ini terletak di bagian selatan dataran tinggi yang masih memiliki banyak potensi hortikultura dan pengembangan. Saat ini daerah dengan wilayah terkecil adalah Peraturan Semarang Selatan dengan luas 5,93 Km<sup>2</sup> dan Pusat Kota Semarang dengan luas 6,14 Km<sup>2</sup>.

Batas Kota Semarang ke arah barat adalah Rezim Kendal, ke arah timur bersatu dengan Aturan Demak, ke arah selatan bersengketa dengan Aturan Semarang dan ke arah utara beralih sepenuhnya ke Samudera Jawa yang berpantai 13,6 kilometer. Letak Wilayah dan Topografi Kota Semarang secara geologis terletak antara 6050' - 7010' Lingkup Selatan dan 109035' - 110050' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada di balai keuangan Pulau Jawa dan merupakan jalur perbaikan Jawa Tengah dengan empat pintu masuk, yaitu Jalur Pantai Utara; Balai Selatan untuk kota-kota penting, misalnya Rezim Magelang Surakarta dikenal sebagai Lintasan Merapi-Merbabu, Balai Timur untuk Pemerintahan Demak/Grobogan; juga, Aturan Kendal yang menuju ke barat. Dalam perkembangan dan perkembangan Jawa Tengah, Semarang menjadi bagian penting, terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi (kereta api dan jalan raya) dan pesawat yang dapat digunakan untuk transportasi di Jawa Tengah. kota. Jawa fokus. Kondisi lain yang kurang signifikan adalah daerah-daerah kekuatan bagi mereka yang berada di luar Jawa, khususnya sebagai titik fokus negara.

#### Data penelitian

**Tabel 3.** Alokasi Anggaran Program Tahun 2019 DPU Kota Semarang

No	Program	Anggaran	Presentase
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 13.930.757.000,00	4,00
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp 5.212.498.486,00	1,50
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp 108.490.000,00	0,03
4	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp 22.036.934.500,00	6,33
5	Program Pengendalian Banjir	Rp 22.996.400.000,00	6,61
6	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Rp 38.750.000.000,00	11,14
7	Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Rp 42.484.323.275,00	12,21
8	Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana SDA	Rp 901.680.000,00	0,26
9	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 160.384.491.539,00	46,10
10	Program Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur	Rp 11.006.748.200,00	3,16
11	Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah	Rp 30.118.000.000,00	8,66
	Jumlah	Rp 347.930.323.000	100,00

Pada Tabel 3 alokasi anggaran program pada tahun 2019 DPU Kota Semarang yaitu sebesar Rp 347.930.323.000,00 yang meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pengendalian Banjir, Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh, Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana SDA, Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur, Program Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur, Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah.

#### Faktor-Faktor SWOT dalam Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal

Berdasarkan penelaahan terhadap pengaturan keuangan DPU Semarang dan rencana pengeluaran yang diuraikan oleh pemeriksa di atas, maka pemeriksa lebih lanjut oleh pemeriksa dapat diperoleh faktor-faktor ke dalam dan ke luar yang dapat mempengaruhi pengaturan pengeluaran kas. Ini dapat dilacak di berbagai buku dan eksplorasi. Benda-benda itu mengerut menjadi dua kelompok, yaitu orang-orang yang akan menguatkan atau yang berkali-kali disebut kekuatan dan orang-orang yang akan menjadi tidak berdaya, tepatnya orang-orang yang akan disebut lemah. Variabel-variabel tersebut akan dipisahkan menjadi dua kelompok yang menggabungkan unsur-unsur yang akan menjadi pintu terbuka atau panggilan (potentially open doors) dan unsur-unsur lain yang akan menimbulkan risiko terhadap rencana keuangan dan rencana keuangan yang akan diperoleh dari kantor DPU kota Semarang, bernama (bahaya).

Faktor-faktor dalam yang terdiri dari kekuatan (Strength), diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel Kepuasan SDM sebagai penghibur dalam pelaksanaan kemerdekaan wilayah;
- 2) unsur moneter sebagai alasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;
- 3) unsur yayasana dan dinas untuk membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah; Lebih-lebih lagi,

- 4) Unsur konstruksi hirarki dan pelaksana sebagai cara untuk melaksanakan administrasi.

Faktor Internal yang dapat memberikan kelemahan atau masuk dalam daftar kelemahan yaitu (*weakness*), diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksana SDM kurang berbakat
- 2) Kewajiban ekstra sebagai pengganti akuisisi perangkat keras
- 3) Pihak berwenang enggan mendapatkannya karena laporan penangkapan yang benar atas tuduhan penghinaan
- 4) Keraguan untuk menjadi pejabat perolehan karena adanya ketimpangan antara kesempatan kerja dan ketidakmerataan yang didapat
- 5) Ketentuan tentang pengaturan latihan bebas belum diatur.

Faktor Eksternal yang merupakan Peluang (*Opportunity*), diantaranya:

- 1) Strategi moneter dan pedoman terdekat
- 2) Perkembangan moneter, biaya pinjaman dan tingkat perdagangan uang
- 3) Laju perkembangan penduduk, keadaan ekologi sosial
- 4) Variabel inovatif yang dapat mempengaruhi perancangan
- 5) Variabel ekologi yang mungkin mempengaruhi latihan atau rencana
- 6) Variabel sah yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan pedoman

Faktor berikutnya yaitu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi ancaman (*threat*), antara lain yaitu:

- 1) Redesain dalam pembentukan nilai-nilai yang dinilai sendiri (HPS)
- 2) Perjanjian tersebut belum disahkan karena berbagai masalah
- 3) Adanya penyesuaian perjanjian
- 4) Otoritas administrasi keuangan sering mengalami lockout.

Akhirnya, penundaan dalam mengubah stockpile cash (GUP) dapat menimbulkan kemunduran untuk pelaksanaan sistem berikutnya. Untuk membedah elemen-elemen yang telah dipahami dan tergambar tersebut, akan dipilih beberapa responden dan diketahui siapa yang dapat menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaturan dan perencanaan penggunaan modal.

**Tabel 4.** Hasil Penilaian Responden terhadap Faktor Internal yang menjadi Kekuatan (Strenght)

No	Faktor Internal	Ya	Tidak
1	unsur kualitas SDM sebagai penghibur dalam pelaksanaan kemandirian daerah;	9	1
2	Variabel moneter sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;	10	0
3	Faktor kantor dan yayasan sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan lingkungan; lebih-lebih lagi,	10	0
4	Hirarki dan faktor eksekutif sebagai cara untuk melakukan administrasi.	7	3

Dari Tabel 4 hasil penilaian responden terhadap faktor internal yang menjadi kekuatan didapatkan data dari 10 responden yang paling banyak pada poin ke 3 dan ke 4.

**Tabel 5.** Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang akan menjadi Kekuatan (Strenght)

No	Faktor Internal	Ya	Bobot
1	unsur kualitas SDM sebagai penghibur dalam pelaksanaan kemandirian daerah;	9	0,25
2	Variabel moneter sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;	10	0,28
3	Faktor kantor dan yayasan sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan lingkungan; lebih-lebih lagi,	10	0,28
4	Hirarki dan faktor eksekutif sebagai cara untuk melakukan administrasi.	7	0,19
Total		36	1,00

Dari Tabel 5 hasil penilaian responden terhadap faktor internal yang menjadi kekuatan didapatkan data dari 10 responden yang memiliki bobot terbanyak yaitu sebesar 0,28 pada poin ke 3 dan ke 4.

**Tabel 6.** Hasil Penilaian Responden terhadap Faktor Internal yang menjadi Kekuatan (Strenght)

No	Faktor Internal	Nilai					Rata-Rata
		1	2	3	4	5	
1	unsur kualitas SDM sebagai penghibur dalam pelaksanaan kemandirian daerah;	0	1	0	4	5	4,3
2	Variabel moneter sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;	0	0	0	4	6	4,6
3	Faktor kantor dan yayasan sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan lingkungan; lebih-lebih lagi,	0	0	1	5	4	4,3
4	Hirarki dan faktor eksekutif sebagai cara untuk melakukan administrasi.	1	2	1	4	2	3,4
Total						36	1,00

Dari Tabel 6 hasil penilaian responden terhadap faktor internal yang menjadi kekuatan mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu pada poin ke 2 dengan nilai rata-rata 4,6.

**Tabel 7.** Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang menjadi Kekuatan (Strenght)

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Total
1	unsur kualitas SDM sebagai penghibur dalam pelaksanaan kemandirian daerah;	0,25	4,3	1,08
2	Variabel moneter sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;	0,28	4,6	1,29
3	Faktor kantor dan yayasan sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan lingkungan; lebih-lebih lagi,	0,28	4,3	1,20
4	Hirarki dan faktor eksekutif sebagai cara untuk melakukan administrasi.	0,19	3,4	0,65
	Total	1,00	36	4,22

Data dari kuesioner tersebut diproses dan dipresentasikan dalam format tabel untuk setiap faktor yang akan dianalisis dalam analisis SWOT. Data kuesioner berdasarkan penilaian responden terhadap faktor kekuatan (strength) ditampilkan dalam Tabel 4.7 sampai Tabel 4.10 di bawah ini.

**Tabel 8.** Hasil Penilaian responden terhadap Faktor Internal yang akan menjadi Kelemahan pada faktor penelitian (*Weakness*)

No	Faktor Eksternal	Ya	Tidak
1	Kurang terampil dalam mengeksekusi SDM	3	7
2	Kewajiban simultan di tempat memperoleh juru masak	8	2
3	Pihak berwenang enggan mendapatkannya karena laporan penangkapan sebenarnya atas tuduhan pencemaran nama baik	6	4
4	Keraguan untuk menjadi perolehan resmi mengingat ketidaksesuaian antara risiko pekerjaan dan hadiah	5	5
5	Deklarasi tentang pengaturan pelaksanaan administrasi mandiri belum ditetapkan.	8	2

Hasil Penilaian responden terhadap Faktor Internal yang akan menjadi Kelemahan pada faktor penelitian (*Weakness*) terdapat 5 poin pertanyaan dengan 8 suara terbanyak yaitu pada poin ke 2 dan ke 5 dari 10 suara.

**Tabel 9.** Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang akan menjadi Kelemahan dalam faktor penelitian (*Weakness*)

No	Faktor Eksternal	Ya	Bobot
1	Kurang terampil dalam mengeksekusi SDM	3	0,1
2	Kewajiban simultan di tempat memperoleh juru masak	8	0,27
3	Pihak berwenang enggan mendapatkannya karena laporan penangkapan sebenarnya atas tuduhan pencemaran nama baik	6	0,2
4	Keraguan untuk menjadi perolehan resmi mengingat ketidaksesuaian antara risiko pekerjaan dan hadiah	5	0,17
5	Deklarasi tentang pengaturan pelaksanaan administrasi mandiri belum ditetapkan.	8	0,27
	Total	30	1,00

Hasil Penilaian responden terhadap Faktor Internal yang akan menjadi Kelemahan pada faktor penelitian (*Weakness*) terdapat 5 poin pertanyaan dengan bobot tertinggi yaitu senilai 0,27.

**Tabel 10.** Hasil Penilaian Responden yang sudah didapatkan terhadap Faktor Internal yang menjadi Kelemahan

No	Faktor Internal	Nilai					Rata-Rata
		1	2	3	4	5	
1	Kurang terampil dalam mengeksekusi SDM	4	3	2	1	0	2
2	Kewajiban simultan di tempat memperoleh juru masak	0	2	1	4	3	3,8
3	Pihak berwenang enggan mendapatkannya karena laporan penangkapan sebenarnya atas tuduhan pencemaran nama baik	2	2	1	3	2	3,1
4	Keraguan untuk menjadi perolehan resmi mengingat ketidaksesuaian antara risiko pekerjaan dan hadiah	3	2	0	3	2	2,9
5	Deklarasi tentang pengaturan pelaksanaan administrasi mandiri belum ditetapkan.	0	2	2	4	2	3,6

Hasil Penilaian responden terhadap Faktor Internal yang akan menjadi Kelemahan pada faktor penelitian (*Weakness*) dengan rata-rata tertinggi yaitu sebedar 3,8 pada poin 2 variabel kewajiban simultan ditempat memperoleh juru masak.

**Tabel 11.** Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang menjadi Kelemahan (*Weakness*)

No	Kurang terampil dalam mengeksekusi SDM	Bobot	Rating	Total
1	Kewajiban simultan di tempat memperoleh juru masak	0,1	2	0,20
2	Pihak berwenang enggan mendapatkannya karena laporan penangkapan sebenarnya atas tuduhan pencemaran nama baik	0,27	3,8	1,03
3	Keraguan untuk menjadi perolehan resmi mengingat ketidaksesuaian antara risiko pekerjaan dan hadiah	0,2	3,1	0,62
4	Deklarasi tentang pengaturan pelaksanaan administrasi mandiri belum ditetapkan.	0,16	2,9	0,46
5	Kurang terampil dalam mengeksekusi SDM	0,27	3,6	0,97
	Total	1,00		3,28

Output dari kuesioner yang tercantum pada tabel-tabel di atas akan dianalisis menggunakan metode SWOT untuk setiap faktor yang relevan. Selanjutnya, hasil kuesioner yang akan diperoleh berdasarkan penilaian yang telah diberikan oleh responden terhadap faktor peluang atau kesempatan akan ditampilkan pada Tabel 4.15 berikut ini.

**Tabel 12.** Hasil Penilaian Responden terhadap Faktor Internal yang menjadi Peluang (*Opportunity*)

No	Faktor Internal	Ya	Tidak
1	Strategi rencana pengeluaran dan pedoman lingkungan	10	0
2	Perkembangan keuangan, biaya pinjaman dan tingkat perdagangan tunai	9	1
3	Laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial	10	0
4	Elemen mekanik yang dapat mempengaruhi konservasi penataan	9	1
5	Faktor alam yang mungkin mempengaruhi gerakan atau rencana	9	1
6	Unsur-unsur hukum yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan pedoman	7	3

Dari tabel 12 hasil penilaian responden terhadap faktor internal yang menjadi peluang (*opportunity*) didapatkan suara terbanyak yaitu pada poin ke 2 laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial sebanyak 10 responden menyatakan setuju dan poin ke 1.

**Tabel 13.** Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang menjadi Peluang (*Opportunity*)

No	Faktor Internal	Ya	Bobot
1	Strategi rencana pengeluaran dan pedoman lingkungan	10	0,19
2	Perkembangan keuangan, biaya pinjaman dan tingkat perdagangan tunai	9	0,17
3	Laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial	10	0,19
4	Elemen mekanik yang dapat mempengaruhi konservasi penataan	9	0,17
5	Faktor alam yang mungkin mempengaruhi gerakan atau rencana	9	0,17
6	Unsur-unsur hukum yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan pedoman	7	0,13
TOTAL		54	1,00

Dari tabel 13 hasil penilaian responden terhadap faktor internal yang menjadi peluang (*opportunity*) didapatkan suara terbanyak yaitu pada poin ke 2 laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial sebanyak 10 responden menyatakan setuju dan poin ke 1 dengan bobot sebesar 0,19.

**Tabel 14.** Hasil Penelitian Responden terhadap Faktor Internal yang menjadi Peluang (*Opportunity*)

No	Faktor Internal	Nilai					Rata-Rata
		1	2	3	4	5	
1	Strategi rencana pengeluaran dan pedoman lingkungan	0	0	0	7	3	4,3
2	Perkembangan keuangan, biaya pinjaman dan tingkat perdagangan tunai	0	1	0	6	3	4,1
3	Laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial	0	0	1	5	4	4,3
4	Elemen mekanik yang dapat mempengaruhi konservasi penataan	0	1	2	3	4	4
5	Faktor alam yang mungkin mempengaruhi gerakan atau rencana	0	1	1	6	2	3,9
6	Unsur-unsur hukum yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan pedoman	1	2	0	5	2	3,5

Dari tabel 14 hasil penilaian responden terhadap faktor internal yang menjadi peluang (*opportunity*) didapatkan suara terbanyak yaitu pada poin ke 2 dan ke 1 dengan nilai rata-rata 4,3.

**Tabel 15.** Hasil Analisa terhadap Faktor Internal yang menjadi Peluang (*Opportunity*)

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Total
1	Strategi rencana pengeluaran dan pedoman lingkungan	0,19	4,3	0,82
2	Perkembangan keuangan, biaya pinjaman dan tingkat perdagangan tunai	0,17	4,1	0,70
3	Laju perkembangan penduduk, keadaan alam sosial	0,19	4,3	0,82
4	Elemen mekanik yang dapat mempengaruhi konservasi penataan	0,17	4	0,68
5	Faktor alam yang mungkin mempengaruhi gerakan atau rencana	0,17	3,9	0,66
6	Unsur-unsur hukum yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan pedoman	0,13	3,5	0,46
TOTAL		1,00		4,13

Hasil dari pengolahan kuisisioner yang telah diolah dalam Tabel 4.18 di atas untuk setiap faktor yang dianalisis dengan metode SWOT. Selanjutnya, hasil kuisisioner berdasarkan penilaian responden terhadap semua faktor eksternal yang merupakan ancaman (*threat*) akan ditampilkan dalam Tabel 4.19 di bawah ini sebagai penilaian responden terhadap faktor-faktor tersebut.

**Tabel 16.** Hasil Penilaian dari Responden terhadap Faktor Internal yang dapat menjadi Ancaman (*Threat*)

No	Faktor Internal	Ya	Tidak
1	desain dalam evaluasi yang dinilai sendiri (HPS)	5	5
2	Perjanjian tersebut belum disahkan karena masalah yang berbeda	4	6
3	Ada addendum perjanjian	2	8
4	Otoritas administrasi moneter sering mengalami perubahan. Kesimpulannya, Ubah Uang Tunai	8	2

Dari tabel 16 di atas Hasil Penilaian dari Responden terhadap Faktor Internal yang dapat menjadi Ancaman (*Threat*) 8 responden menyatakan tidak pada poin ke 3 dan 8 responden mengatakan ya pada poin ke 4.

**Tabel 17.** Hasil Analisa terhadap Faktor Eksternal yang menjadi Ancaman (*threat*)

No	Faktor Internal	Ya	Bobot
1	desain dalam evaluasi yang dinilai sendiri (HPS)	5	0,26
2	Perjanjian tersebut belum disahkan karena masalah yang berbeda	4	0,21
3	Ada addendum perjanjian	2	0,11
4	Otoritas administrasi moneter sering mengalami perubahan. Kesimpulannya, Ubah Uang Tunai	8	0,42
TOTAL		19	1,00

Hasil analisa terhadap faktor eksternal yang menjadi ancaman yang mendapat nilai tertinggi yaitu poin ke 4 sebesar 8 orang dengan bobot 0,42.

**Tabel 18.** Hasil Penilaian Responden terhadap Faktor Eksternal yang menjadi Ancaman (*Threat*)

No	Faktor Internal	Nilai					Rata-Rata
		1	2	3	4	5	
1	desain dalam evaluasi yang dinilai sendiri (HPS)	2	3	1	2	2	2,9
2	Perjanjian tersebut belum disahkan karena masalah yang berbeda	2	4	1	2	1	2,6
3	Ada addendum perjanjian	4	4	1	1	0	1,9
4	Otoritas administrasi moneter sering mengalami perubahan. Kesimpulannya, Ubah Uang Tunai	0	0	2	4	4	4,2

Hasil analisa terhadap faktor eksternal yang menjadi ancaman yang mendapat nilai tertinggi yaitu poin ke 4 sebesar 8 orang dengan nilai rata-rata 4,2.

**Tabel 19.** Hasil Analisa terhadap Faktor Eksternal yang menjadi Ancaman (*Threat*)

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Total
1	desain dalam evaluasi yang dinilai sendiri (HPS)	0,26	2,9	0,75
2	Perjanjian tersebut belum disahkan karena masalah yang berbeda	0,21	2,6	0,55
3	Ada addendum perjanjian	0,11	1,9	0,21
4	Otoritas administrasi moneter sering mengalami perubahan. Kesimpulannya, Ubah Uang Tunai	0,42	4,2	1,76
TOTAL		1,00		3,27

Hasil penilaian perspektif dalam dan luar yang kemudian akan disurvei digunakan untuk menunjukkan area strategi penilaian SWOT dalam Penilaian Siklus Penyusunan dan Perencanaan Spekulasi Kota Semarang Tahun Anggaran 2019, yang kuadran harus terlihat. Sejak saat itu, efek setelah evaluasi akan ditunjukkan pada Tabel 4.22 di bawah ini.

**Tabel 20.** SKOR IFAS dan EFAS Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal Kota Semarang Tahun Anggaran 2019

IFAS		EFAS	
Kategori	Total Skor	Kategori	Total Skor
Kekuatan (S)	4,22	Peluang (O)	4,13
Kelemahan (W)	3,28	Ancaman (T)	3,27
Total (S-W)	0,94	Total (O-T)	0,86

Dari tabel 20 di atas didapatkan nilai IFAS dan EFAS dengan total skor selisihnya yaitu IFAS 0,94 sedangkan EFAS 0,86.

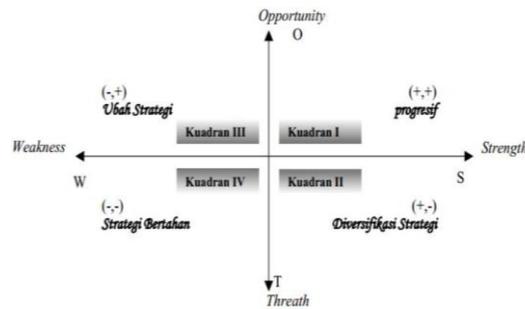
### Hasil Matrik SWOT

Berdasarkan hasil penilaian Tabel 4.23 dengan menggunakan penilaian SWOT dengan skor IFAS dan EFAS, maka dapat dilihat bahwa Penyusunan dan Perencanaan Pemanfaatan Modal Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 terletak pada Kuadran I. Maka , pada saat itu, arah dapat ditentukan, khususnya:

Koordinat Analisa Internal: (S-W)/2 : (4,22-3,28)/2 : 0,47

Koordinat Analisa Eksternal: (O-T)/2 : (4,13-3,27) : (0,43)

Efek samping dari Penilaian SWOT kemudian dapat ditampilkan di Kotak SWOT yang dapat dilihat dari konsekuensi penilaian IFAS dan EFAS pada Tabel 4.24 di bawah ini. Teknik-teknik berdasarkan situasi di Kuadran I dapat dibedakan.



**Gambar 4.1** Hasil Matrik SWOT

Teknik yang harus dihasilkan untuk Penataan dan Perencanaan Konsumsi Modal Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 adalah bidang kekuatan yang serius untuk yang kritis. Saran strategi yang diberikan adalah Sedang, artinya Penyusunan dan Perencanaan Penggunaan Modal Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 dalam persiapan yang sah. Sehingga sangat memungkinkan untuk terus menyelesaikan perpanjangan, mempercepat persiapan yang ada dan tepat seperti yang diharapkan.

**Tabel 21.** Matriks Strategi SWOT

<i>External</i>	<i>Internal</i>	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
<b>OPPORTUNITIES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan anggaran dan peraturan daerah</li> <li>2. Pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan nilai tukar mata uang</li> <li>3. Tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial</li> <li>4. Faktor teknologi yang dapat mempengaruhi kelangsungan perencanaan</li> <li>5. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivitas atau rencana</li> <li>6. Faktor hukum yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor kualitas SDM sebagai pelaku dalam penyelenggaraan otonomi daerah;</li> <li>2. Faktor keuangan sebagai tulang punggung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah;</li> <li>3. Faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah; dan</li> <li>4. Faktor organisasi dan manajemen sebagai sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pelaksana kurang kompeten</li> <li>2. Rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan</li> <li>3. Ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan pejabat atas tuduhan korupsi</li> <li>4. Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbang resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima</li> <li>5. SK penunjukan kegiatan swakelola belum ditetapkan.</li> </ol>
<b>THREATS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS)</li> <li>2. Kontrak belum ditandatangani karena berbagai permasalahan</li> <li>3. Adanya addendum kontrak</li> <li>4. Pejabat pengelola keuangan sering mengalami mutasi.</li> </ol>	<b>STRATEGI (STRENGTH- OPPORTUNITIES)</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor kualitas SDM sebagai pelaku dalam penyelenggaraan otonomi daerah;</li> <li>2. Faktor keuangan sebagai tulang punggung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah;</li> <li>3. Faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah;</li> <li>4. Faktor organisasi dan manajemen sebagai sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah.</li> <li>5. Kebijakan anggaran dan peraturan daerah</li> <li>6. Pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan nilai tukar mata uang</li> <li>7. Tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial</li> <li>8. Faktor teknologi yang dapat mempengaruhi kelangsungan perencanaan</li> <li>9. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivitas atau rencana</li> <li>10. Faktor hukum yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan</li> </ol>		

**4. KESIMPULAN**

Melalui konsekuensi eksplorasi, cenderung disimpulkan bahwa:

1. Agar pelaksanaan keuangan Pemerintah Daerah Semarang dapat mengikuti tingkat kecukupan dan kemampuannya dalam RAPBN periode berikutnya, dengan membuat perencanaan pelaksanaan keuangan Pemerintah Daerah Semarang yang kuat dan efektif pada tahun-tahun berikutnya. .
2. Terkait dengan isu penurunan dan perluasan (bimbang) tingkat kecukupan dan kemampuan pelaksanaan keuangan DPU Pemda Semarang, perlu difokuskan pada leading assessment atau re-control dari DPRD terhadap proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan. dilakukan, agar target pengakuan akurat dan memberdayakan penyajian keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam waktu dekat dapat terus terprediksi dalam hal kelayakan dan efektivitas.
3. Agar analisis di masa mendatang dapat mendukung pemeriksaan ini dengan menggunakan teknik wawasan serupa atau penyelidikan yang lebih baik (tepat) terkait dengan pelaksanaan keuangan teritorial.

### Saran

1. Agar pelaksanaan keuangan Pemerintah Daerah Semarang dapat mengikuti tingkat kecukupan dan kemampuannya dalam RAPBN periode berikutnya, dengan membuat perencanaan pelaksanaan keuangan Pemerintah Daerah Semarang yang kuat dan efektif pada tahun-tahun berikutnya.
2. Mengenai masalah pengurangan dan perluasan (varians) dalam tingkat kelangsungan hidup dan kemampuan DPU daerah Pemda Semarang, penting untuk fokus pada penilaian terkemuka atau mendapatkan kembali dari Pemprov proyek/latihan yang akan diselesaikan, sehingga target pengakuan yang akurat dan pemberdayaan kinerja keuangan Pemda Semarang dalam waktu dekat dapat terus terprediksi kecukupan dan produktivitasnya.
3. Untuk analisis masa depan untuk memiliki pilihan untuk mendorong eksplorasi ini menggunakan strategi wawasan serupa atau penelitian yang lebih baik (tepat) terkait dengan eksekusi moneter lokal

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. N.D. Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- [2] Permen Pu Nomor 45 Tahun 2008. N.D. "Permenpupr22-2018."
- [3] Perpres No. 70 Tahun 2012. N.D. Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- [4] Pustaka Armstrong, Daftar, M. Dan Taylor, S. Kogan Page, M. J. Avedon, G. Scholes, K. Dan Backhaus,
- [5] S. Sarraf, M. And Bruneau, M. (1998). "Ductile seismic retrofit of steel deck-truss bridges, II: Design applications.". *J. Struct. Engrg.*, ASCE, 124(11), 1263-1271
- [6] Tikoo, D. Boshard, And A. Dan Louw. 2014. *The Handbook Of Best Practices On Talent Management: Mengidentifikasi, Mengembangkan Dan Mempromosikan Orang Terbaik Untuk Menciptakan Keunggulan Organisasi*. Jakarta: Ppm. (Original Work Diterbitkan Tahun. Vol. 20. Harvard Business School Press.
- [7] Mardiasmo (2009) Dalam Sahala Purba 2021. N.D. "88-Article Text-225-1-10-20210227.
- [8] Sandri Dalam Gaghauna, Richard D. E., David P. E. Saerang, And Jessy D. L. Warongan. N.D. Analisis Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- [9] Soekanto 2019. N.D. Soerjono Soekanto.
- [10] Sunaryo (2006). N.D. "Pengaruh Variabel-Variabel Karakteristik Anggaran Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Pada Pt. (Persero) Pelabuhan Indonesia Iii Drs. Agus Sunaryo, Mm Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya."
- [11] Tandiontong (2016) Dalam Gaghauna, Richard D. E., David P. E. Saerang, And Jessy D. L. Warongan. N.D. Analisis Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- [12] UU No.5 Tahun 1999. 1999ad. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang.
- [13] UU No.32 Tahun 2004. N.D. "Uu No.32 Tahun 2004."